

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi Daerah dan Harga Barang Kebutuhan Pokok, Barang Lainnya, serta Jasa

1. Perkembangan Inflasi Terkini

Inflasi Indonesia pada Mei 2026 tercatat sebesar **3,08% (year-on-year/yoy)**, meningkat dibandingkan April 2026 yang sebesar 2,42% (yoy), namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Secara bulanan, inflasi mencapai 0,28% (month-to-month/mtm).

Peningkatan inflasi terjadi di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda, terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta beberapa komoditas energi dan transportasi.

2. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting)

Beberapa komoditas yang memberikan tekanan inflasi antara lain:

- Cabai merah dan cabai rawit akibat gangguan pasokan dan faktor cuaca.
- Beras yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah.
- Minyak goreng yang menunjukkan tren kenaikan dan menjadi perhatian pemerintah daerah.
- Bahan bakar rumah tangga (termasuk LPG non-subsidi).
- Produk pangan lainnya yang mengalami peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan.

Kelompok **volatile food (pangan bergejolak)** mencatat inflasi tahunan sebesar 6,24%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,37%, menunjukkan bahwa tekanan harga pangan masih menjadi faktor dominan inflasi daerah.

3. Perkembangan Harga Barang Lainnya dan Jasa

Selain bahan pangan, inflasi juga dipengaruhi oleh:

- Kenaikan harga emas perhiasan.
- Produk tembakau dan rokok.
- Tarif angkutan udara.
- Biaya energi dan utilitas rumah tangga.
- Berbagai jasa transportasi dan layanan masyarakat.

Kelompok **inflasi inti** meningkat menjadi 2,59% (yoy), mencerminkan adanya tekanan dari sisi permintaan dan biaya produksi yang relatif lebih permanen.

4. Risiko Inflasi ke Depan

Beberapa risiko yang perlu diwaspadai ke depan meliputi:

1. Risiko pasokan pangan

- Cuaca ekstrem dan gangguan produksi pertanian dapat memicu kenaikan harga cabai, beras, bawang, dan komoditas pangan lainnya.

2. Peningkatan permintaan musiman

- Hari besar keagamaan, liburan sekolah, dan periode akhir tahun berpotensi meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga mendorong inflasi.

3. Kenaikan biaya energi dan transportasi

- Fluktuasi harga energi global dapat meningkatkan biaya distribusi dan produksi.

4. Tekanan harga bahan baku

- Survei Bank Indonesia menunjukkan ekspektasi kenaikan harga dalam beberapa bulan mendatang masih relatif tinggi.

5. Gejolak ekonomi global dan nilai tukar

- Ketidakpastian ekonomi dunia dan pergerakan nilai tukar rupiah dapat memengaruhi harga barang impor dan biaya produksi domestik.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pengendalian inflasi di daerah menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi antara lain:

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

Banyak daerah masih bergantung pada pasokan bahan pangan dari daerah lain. Ketika terjadi gangguan produksi atau distribusi di daerah pemasok, ketersediaan barang menjadi berkurang dan harga cenderung meningkat.

2. Gangguan Distribusi dan Logistik

Keterbatasan infrastruktur jalan, transportasi, pergudangan, serta tingginya biaya logistik menyebabkan harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal, terutama di daerah terpencil dan kepulauan.

3. Produksi Pangan yang Belum Stabil

Produksi komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam sering dipengaruhi oleh faktor cuaca, serangan hama, penyakit tanaman, serta perubahan musim yang menyebabkan fluktuasi pasokan dan harga.

4. Tingginya Volatilitas Harga Pangan

Kelompok pangan bergejolak (volatile food) masih menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Harga komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat akibat perubahan pasokan dan permintaan.

5. Keterbatasan Data dan Sistem Informasi Harga

Masih terdapat daerah yang belum memiliki sistem pemantauan harga yang cepat dan akurat sehingga respons kebijakan terhadap gejolak harga sering terlambat.

6. Lemahnya Manajemen Cadangan Pangan

Ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah maupun cadangan pangan masyarakat masih terbatas sehingga sulit melakukan intervensi ketika terjadi lonjakan harga atau gangguan pasokan.

7. Praktik Distribusi yang Tidak Efisien

Panjang rantai distribusi dari produsen ke konsumen menyebabkan adanya tambahan biaya dan potensi spekulasi harga oleh pelaku pasar tertentu.

8. Peningkatan Permintaan Musiman

Pada periode tertentu seperti bulan Ramadan, Idulfitri, Natal, Tahun Baru, dan liburan sekolah, permintaan barang dan jasa meningkat signifikan sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga.

9. Koordinasi Antarinstansi yang Belum Optimal

Pelaksanaan program pengendalian inflasi sering menghadapi kendala koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

10. Keterbatasan Anggaran dan Program Intervensi

Sebagian pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk melaksanakan operasi pasar, subsidi distribusi, pengembangan sentra produksi, maupun program stabilisasi harga.

11. Pengaruh Faktor Eksternal

Kenaikan harga energi, perubahan nilai tukar rupiah, gejolak ekonomi global, dan gangguan rantai pasok internasional dapat memengaruhi harga barang dan jasa di daerah.

Isu Strategis yang Perlu Mendapat Perhatian

1. Penguatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan produksi lokal.
2. Perbaikan sistem distribusi dan konektivitas logistik.
3. Pengembangan kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin pasokan komoditas strategis.
4. Optimalisasi pemanfaatan data harga secara real time.
5. Penguatan peran **Tim Pengendalian Inflasi Daerah** dalam koordinasi pengendalian inflasi.
6. Peningkatan efektivitas pelaksanaan strategi **4K**:
 - Keterjangkauan harga.
 - Ketersediaan pasokan.
 - Kelancaran distribusi.
 - Komunikasi efektif.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan melalui koordinasi dalam wadah **Tim Pengendalian Inflasi Daerah** untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan melindungi daya beli masyarakat.

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan

Kebijakan yang dilakukan antara lain:

- Monitoring produksi dan stok komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, dan telur ayam.
- Pengembangan sentra produksi pangan daerah.
- Pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.
- Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Pelaksanaan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan komoditas yang mengalami kekurangan pasokan.

2. Kelancaran Distribusi

Upaya yang dilakukan meliputi:

- Pemantauan distribusi barang kebutuhan pokok dari produsen hingga pasar.
- Fasilitasi transportasi dan distribusi komoditas strategis.
- Penghapusan hambatan distribusi antarwilayah.
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga kelancaran jalur logistik, terutama pada periode hari besar keagamaan dan cuaca ekstrem.

3. Menjaga Keterjangkauan Harga

Kebijakan stabilisasi harga dilakukan melalui:

- Operasi pasar murah.
- Gerakan pangan murah.
- Subsidi transportasi atau distribusi pada daerah tertentu.
- Intervensi pasar ketika terjadi lonjakan harga komoditas strategis.
- Pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun modern.

4. Penguatan Komunikasi Efektif

Pemerintah daerah melakukan:

- Publikasi perkembangan harga dan inflasi secara berkala.
- Edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak.
- Sosialisasi ketersediaan pasokan untuk menghindari panic buying.
- Penyampaian informasi hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi kepada masyarakat

dan pelaku usaha.

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan pengendalian inflasi dilakukan melalui:

- Rapat koordinasi rutin TPID.
- Pemantauan harga harian dan mingguan.
- Analisis risiko inflasi daerah.
- Penyusunan langkah antisipatif terhadap komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga.

6. Sinergi dengan Pemerintah Pusat

Pemerintah daerah mendukung berbagai program nasional, antara lain:

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
- Penguatan ketahanan pangan daerah.
- Pengendalian inflasi sesuai strategi nasional 4K:
 - Keterjangkauan harga.
 - Ketersediaan pasokan.
 - Kelancaran distribusi.
 - Komunikasi efektif.

Kendala dalam Pelaksanaan

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain:

- Ketergantungan pasokan dari luar daerah.
- Produksi pangan yang dipengaruhi cuaca dan musim.
- Keterbatasan anggaran intervensi pasar.
- Tingginya biaya logistik.
- Keterbatasan fasilitas penyimpanan dan rantai dingin (cold storage).
- Belum optimalnya data harga dan pasokan secara real time.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

1. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui **Tim Pengendalian Inflasi Daerah** secara aktif melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi lintas sektor, pelaksanaan High Level Meeting (HLM), pemantauan harga kebutuhan pokok, penguatan ketahanan pangan, dan kerja sama dengan Bank Indonesia serta instansi terkait. Sepanjang 2025-2026, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2. Evaluasi Capaian Kebijakan

A. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Capaian:

- TPID Bondowoso secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dan HLM yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Forkopimda, dan perangkat daerah terkait.
- Terjadi penguatan sinergi antara TPID, tim percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tim digitalisasi daerah sehingga pengendalian inflasi tidak dilakukan secara sektoral.

Evaluasi:

- Koordinasi antarinstansi sudah berjalan baik.
- Komitmen pimpinan daerah cukup kuat dalam menjadikan inflasi sebagai isu strategis daerah.
- Namun efektivitas koordinasi masih perlu diukur melalui indikator hasil (outcome), bukan hanya jumlah rapat atau forum yang diselenggarakan.

B. Aspek Ketersediaan Pasokan

Capaian:

- Pemerintah daerah mendorong penguatan ketahanan pangan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal sebagai langkah menjaga pasokan komoditas strategis.

Evaluasi:

- Bondowoso memiliki potensi besar pada sektor pertanian sehingga relatif memiliki daya dukung terhadap pengendalian inflasi pangan.
- Tantangan utama masih berupa ketergantungan pada pasokan beberapa komoditas tertentu dari luar daerah, terutama saat produksi lokal terganggu akibat cuaca atau musim.

C. Aspek Kelancaran Distribusi

Capaian:

- Pemerintah daerah melakukan pemantauan distribusi bahan pokok dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas pasokan.

Evaluasi:

- Infrastruktur distribusi di beberapa wilayah pedesaan masih menjadi kendala.
- Biaya logistik dan rantai distribusi yang panjang masih berpotensi meningkatkan harga di tingkat konsumen.

D. Aspek Keterjangkauan Harga

Capaian:

Pemantauan harga dilakukan secara berkala melalui TPID dan mengikuti arahan pengendalian inflasi nasional.

Evaluasi:

- Pengawasan harga sudah berjalan, tetapi masih diperlukan intervensi yang lebih cepat pada saat terjadi lonjakan harga komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras.
- Operasi pasar dan pasar murah perlu lebih terarah berdasarkan data wilayah yang mengalami tekanan harga tertinggi.

E. Aspek Komunikasi dan Digitalisasi

Capaian:

- Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan percepatan digitalisasi daerah melalui sinergi TPID dan TP2DD.

Evaluasi:

- Langkah ini merupakan inovasi yang positif karena dapat meningkatkan kualitas data harga dan pengambilan keputusan.
 - Namun pemanfaatan data harga secara real time dan dashboard inflasi daerah masih perlu diperkuat.
-

3. Permasalahan yang Masih Dihadapi

1. Fluktuasi harga pangan akibat perubahan cuaca dan musim.
 2. Ketergantungan pasokan beberapa komoditas dari luar daerah.
 3. Keterbatasan sarana penyimpanan hasil pertanian (gudang dan cold storage).
 4. Belum optimalnya sistem informasi harga berbasis digital.
 5. Tingginya biaya distribusi pada beberapa wilayah.
 6. Belum kuatnya kerja sama perdagangan antar daerah untuk seluruh komoditas strategis.
 7. Keterbatasan anggaran intervensi pasar saat terjadi gejolak harga.
-

4. Rekomendasi Kebijakan

Jangka Pendek

- Memperkuat pemantauan harga harian dan stok pangan.
- Meningkatkan frekuensi operasi pasar dan gerakan pangan murah.
- Memperkuat koordinasi dengan **Perum Bulog** untuk menjaga stok beras.
- Mengoptimalkan kerja sama pasokan antar daerah.

Jangka Menengah

- Mengembangkan sentra produksi komoditas penyumbang inflasi.
- Membangun fasilitas penyimpanan dan rantai dingin (cold storage).
-

- Mengembangkan sistem informasi harga berbasis digital yang terintegrasi.
- Memperkuat kelembagaan petani dan distribusi pangan.

Jangka Panjang

- Mewujudkan kemandirian pangan daerah.
 - Meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui modernisasi teknologi.
 - Mengintegrasikan kebijakan inflasi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah dan pengurangan kemiskinan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bondowoso

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bondowoso perlu difokuskan pada penguatan sektor pertanian, stabilisasi pasokan pangan, efisiensi distribusi, dan penguatan sistem informasi harga. Mengingat struktur ekonomi Bondowoso yang didominasi sektor pertanian, kebijakan pengendalian inflasi harus diarahkan untuk mengurangi gejolak harga pangan yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi daerah.

1. Penguatan Ketersediaan Pasokan Pangan

a. Pengembangan Komoditas Penyumbang Inflasi

Pemerintah daerah perlu menetapkan komoditas prioritas seperti:

- Beras
- Cabai merah
- Cabai rawit
- Bawang merah
- Telur ayam ras
- Minyak goreng

Langkah yang dapat dilakukan:

- Perluasan areal tanam.
- Penyediaan benih unggul dan sarana produksi.
- Pendampingan petani melalui penyuluhan dan teknologi pertanian.

b. Penguatan Cadangan Pangan Daerah

- Membentuk dan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah.
- Mengembangkan lumbung pangan desa.
- Menjalin kerja sama dengan **Perum Bulog** untuk menjaga ketersediaan stok beras.

2. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)

Bondowoso perlu memperluas kerja sama perdagangan dengan daerah sentra produksi pangan di Jawa Timur untuk menjamin pasokan saat produksi lokal menurun.

Kebijakan yang dapat dilakukan:

- Perjanjian pasokan komoditas strategis.
- Kerja sama distribusi pangan antar kabupaten.
- Pengembangan rantai pasok berbasis kawasan.

Tujuan: mengurangi risiko kelangkaan dan lonjakan harga akibat gangguan pasokan.

3. Peningkatan Efisiensi Distribusi dan Logistik

a. Pengurangan Biaya Distribusi

- Perbaikan infrastruktur jalan menuju sentra produksi.
- Penguatan konektivitas pasar dan sentra distribusi.
- Fasilitasi transportasi komoditas strategis.

b. Pengembangan Sarana Penyimpanan

- Pembangunan gudang pangan.
 - Pengembangan cold storage untuk komoditas hortikultura.
 - Penyediaan fasilitas pascapanen guna mengurangi kehilangan hasil (losses).
-

4. Digitalisasi Sistem Pemantauan Harga

Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu membangun sistem informasi harga berbasis digital yang terintegrasi.

Fungsi utama:

- Monitoring harga harian secara real time.
- Pemetaan wilayah yang mengalami kenaikan harga.
- Sistem peringatan dini (early warning system).
- Penyusunan kebijakan berbasis data.

Manfaat:

- Respons kebijakan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
-

5. Optimalisasi Program Stabilisasi Harga

a. Gerakan Pangan Murah

Program ini perlu dilaksanakan secara berkala, terutama:

- Menjelang Ramadan.
- Menjelang Idulfitri.
- Menjelang Natal dan Tahun Baru.

b. Operasi Pasar Terarah

Intervensi pasar dilakukan berdasarkan:

- Komoditas penyumbang inflasi.
 - Wilayah yang mengalami tekanan harga tertinggi.
 - Kelompok masyarakat rentan.
-

6. Penguatan Kelembagaan TPID

Peran **Tim Pengendalian Inflasi Daerah** perlu diperkuat melalui:

- Analisis risiko inflasi secara berkala.
 - Penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi.
 - Monitoring dan evaluasi program berbasis indikator kinerja.
 - Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
-

7. Peningkatan Produktivitas Pertanian

Sebagai daerah agraris, Bondowoso perlu fokus pada:

- Modernisasi pertanian.
- Mekanisasi alat dan mesin pertanian.
- Pengembangan pertanian berbasis teknologi.
- Penguatan irigasi dan pengelolaan air.
- Asuransi usaha tani untuk mengurangi risiko gagal panen.

Tujuan:

- Menjaga kesinambungan produksi.
 - Mengurangi gejolak harga akibat gangguan pasokan.
-

8. Penguatan Komunikasi dan Edukasi Publik

Pemerintah daerah perlu:

- Menyampaikan informasi harga dan stok pangan secara terbuka.
- Mengedukasi masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak.
- Mencegah panic buying saat terjadi gejolak harga.

9. Integrasi Pengendalian Inflasi dengan Pengentasan Kemiskinan

Inflasi pangan sangat berdampak pada rumah tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu diperlukan:

- Perlindungan sosial yang tepat sasaran.
 - Bantuan pangan bagi kelompok rentan.
 - Program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - Penguatan UMKM pangan lokal.
-

Prioritas Kebijakan untuk Bondowoso

Jika disusun berdasarkan tingkat urgensi, maka prioritas utama adalah:

1. Penguatan produksi pangan lokal.
2. Digitalisasi pemantauan harga dan pasokan.
3. Penguatan kerja sama antar daerah.
4. Pengembangan gudang dan cold storage.
5. Optimalisasi operasi pasar dan gerakan pangan murah.
6. Penguatan kelembagaan TPID berbasis data.